



Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dalam Penanganan Permukiman Kumuh

Nur Anggita Rahmadani^{1*}, Riri Maria Fatriani², Suci Rahmadani³

¹⁻³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Indonesia

nuranggitaramadhani40@gmail.com¹, ririfatriani@unja.ac.id², sucirahmadani@unja.ac.id³

*Penulis korespondensi: nuranggitaramadhani40@gmail.com

Abstract. *Slums are an urban issue that arises due to rapid population growth and the limited capacity of local governments to provide adequate housing and basic infrastructure. This leads to areas with low environmental quality, limited access, poor drainage, and high socio-economic vulnerability. A similar phenomenon occurs in Jambi City, which requires a sustainable handling strategy. This study aims to analyze the strategies implemented by the Department of Public Housing and Settlement Areas of Jambi City in addressing slums and assess their contribution to environmental quality. A descriptive qualitative approach was used to understand the policies, program implementation mechanisms, and institutional challenges. Data was collected through interviews with government officials, field observations, and analysis of planning documents. The results indicate that the strategy focuses on improving basic infrastructure, such as road construction, drainage rehabilitation, and the provision of settlement facilities. This program enhances environmental quality and accessibility but faces challenges such as budget limitations, suboptimal inter-agency coordination, and the socio-economic conditions of the community. Addressing slums requires a more comprehensive approach, including collaborative governance, increased community participation, and adaptive policies to ensure sustainable improvements.*

Keywords: *Collaborative Governance; Housing Policy; Public Strategy; Slum Upgrading; Urban Governance*

Abstrak. Permukiman kumuh merupakan persoalan perkotaan yang timbul akibat pertumbuhan penduduk pesat dan keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian dan infrastruktur dasar yang layak. Hal ini menyebabkan kawasan dengan kualitas lingkungan rendah, akses terbatas, drainase buruk, dan kerentanan sosial ekonomi tinggi. Fenomena serupa terjadi di Kota Jambi, yang memerlukan strategi penanganan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dalam menangani permukiman kumuh dan menilai kontribusinya terhadap kualitas lingkungan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami kebijakan, mekanisme implementasi program, dan tantangan kelembagaan. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur pemerintah, observasi lapangan, dan analisis dokumen perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, seperti pembangunan jalan, rehabilitasi drainase, dan penyediaan sarana permukiman. Program ini meningkatkan kualitas lingkungan dan aksesibilitas, namun terkendala anggaran, koordinasi antarinstansi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penanganan permukiman kumuh memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk tata kelola kolaboratif, peningkatan partisipasi masyarakat, dan kebijakan adaptif agar perbaikan berlangsung berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan Perumahan; Penanganan Kumuh; Strategi Publik; Tata Kelola Kolaboratif; Tata Kelola Perkotaan

1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan penduduk perkotaan yang semakin pesat sering kali tidak diikuti dengan ketersediaan hunian layak serta infrastruktur permukiman yang memadai. Kondisi tersebut memicu munculnya kawasan permukiman dengan kualitas lingkungan yang rendah, kepadatan bangunan tinggi, serta keterbatasan sarana dasar seperti jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dan ruang terbuka (Damayanti et al., 2025). Permukiman dengan karakteristik tersebut umumnya dikategorikan sebagai kawasan kumuh karena menunjukkan penurunan kualitas lingkungan dan tidak memenuhi standar kelayakan hunian. Permasalahan ini menjadi isu

penting dalam pembangunan perkotaan karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, kesehatan lingkungan, serta keberlanjutan tata ruang kota (Sari & Ridlo, 2021).

Pemerintah Indonesia telah menempatkan penanganan kawasan kumuh sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional melalui berbagai kebijakan di sektor perumahan dan permukiman. Upaya tersebut tercermin dalam berbagai program peningkatan kualitas permukiman yang bertujuan mengurangi luas kawasan kumuh serta meningkatkan akses masyarakat terhadap lingkungan hunian yang layak (Organizations, 2024). Kebijakan tersebut menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola pembangunan, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu menjaga keberlanjutan lingkungan permukiman (UN-Habitat, 2020).

Kondisi serupa juga ditemukan di Kota Jambi, di mana perkembangan wilayah perkotaan diiringi dengan munculnya beberapa kawasan permukiman yang memiliki karakteristik kumuh. Permasalahan tersebut umumnya berkaitan dengan kualitas jalan lingkungan yang belum memadai, sistem drainase yang kurang berfungsi secara optimal, serta keterbatasan sarana dan prasarana dasar permukiman. Keberadaan kawasan dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan permukiman menjadi salah satu tantangan penting bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan kota yang tertata dan berkelanjutan (Istikasari & Khadiyanto, 2014)

Sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi memiliki peran strategis dalam merumuskan serta melaksanakan berbagai program penanganan kawasan kumuh (Jambi, 2022). Berbagai upaya dilakukan melalui peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan, perbaikan sistem drainase, serta penyediaan sarana pendukung permukiman yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat. Strategi yang diterapkan tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik, tetapi juga berupaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan hasil pembangunan (Perkim kota jambi, 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan kawasan kumuh sangat dipengaruhi oleh strategi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Pendekatan yang terlalu berfokus pada pembangunan fisik sering kali belum mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh apabila tidak disertai dengan penguatan tata kelola, koordinasi kelembagaan, serta partisipasi masyarakat (Sukmaniar et al., 2020). Oleh karena itu, kajian mengenai strategi pemerintah daerah menjadi penting untuk memahami

bagaimana kebijakan penanganan kawasan kumuh dirancang dan diimplementasikan dalam praktik pembangunan perkotaan (Kettunen et al., 2019).

Meskipun berbagai program peningkatan kualitas permukiman telah dilaksanakan, kajian yang secara khusus menganalisis strategi kelembagaan pemerintah daerah dalam penanganan kawasan kumuh masih relatif terbatas, terutama pada tingkat pemerintah kota (Wheeler, 2013). Sebagian penelitian lebih banyak membahas aspek teknis pembangunan infrastruktur atau evaluasi program secara umum, sehingga belum banyak yang menyoroti bagaimana strategi institusional dirumuskan, dijalankan, dan dihadapkan pada berbagai tantangan implementasi di tingkat lokal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kajian yang perlu diisi melalui penelitian yang lebih mendalam mengenai strategi penanganan kawasan kumuh oleh pemerintah daerah (Krisnajayanti & Zain, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dalam upaya penanganan kawasan kumuh serta mengkaji bagaimana strategi tersebut diimplementasikan melalui berbagai program peningkatan kualitas permukiman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik penanganan kawasan kumuh di tingkat pemerintah daerah sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian mengenai strategi kebijakan publik di bidang perumahan dan permukiman.

2. KAJIAN TEORITIS

Permasalahan permukiman kumuh merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan perkotaan yang berkaitan erat dengan kualitas lingkungan tempat tinggal, ketersediaan infrastruktur dasar, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola pertumbuhan kota. Kawasan permukiman kumuh umumnya ditandai dengan kondisi hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan, kepadatan bangunan yang tinggi, keterbatasan akses terhadap sarana dasar, serta lingkungan yang kurang tertata. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial dan lingkungan, seperti menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, meningkatnya kerentanan terhadap bencana lingkungan, serta rendahnya kualitas hidup warga yang tinggal di kawasan tersebut. Oleh karena itu, penanganan kawasan kumuh menjadi salah satu agenda penting dalam kebijakan pembangunan perkotaan (Fitri & Sulistinah, 2021).

Dalam kajian administrasi publik, upaya penanganan berbagai persoalan sosial, termasuk masalah permukiman kumuh, tidak dapat dilepaskan dari penerapan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Strategi dalam sektor publik merujuk pada serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan kebijakan

yang telah ditetapkan. Mulgan (2009) menjelaskan bahwa strategi publik mencakup tiga komponen utama, yaitu penetapan tujuan yang jelas, pelaksanaan tindakan atau program untuk mencapai tujuan tersebut, serta proses pembelajaran melalui evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Ketiga komponen tersebut menjadi kerangka penting dalam memahami bagaimana organisasi pemerintah merumuskan dan menjalankan kebijakan untuk mengatasi persoalan publik secara efektif (Bryson & John, 2018).

Pendekatan strategi publik menjadi relevan dalam menganalisis penanganan kawasan kumuh karena permasalahan permukiman tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu bentuk intervensi. Penanganan kawasan kumuh membutuhkan kebijakan yang terarah melalui perencanaan tujuan yang jelas, implementasi program yang terintegrasi, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan program yang dijalankan. Dalam praktiknya, pemerintah daerah sering menerapkan berbagai program peningkatan kualitas infrastruktur permukiman seperti pembangunan jalan lingkungan, perbaikan sistem drainase, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus mengurangi indikator kekumuhan (Pearce & Robinson, 2008).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur permukiman merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mengurangi tingkat kekumuhan di kawasan perkotaan. Namun demikian, keberhasilan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi yang tepat serta mengoordinasikan berbagai program pembangunan secara terpadu (Sukmaniar et al., 2020). Dengan demikian, kajian mengenai strategi pemerintah daerah menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan penanganan kawasan kumuh dirancang dan diimplementasikan dalam praktik pembangunan. Berangkat dari landasan teoritis tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis strategi yang dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dalam upaya penanganan kawasan permukiman kumuh.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggambarkan secara komprehensif proses perumusan tujuan, pelaksanaan tindakan, serta proses evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh instansi terkait. Desain deskriptif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang utuh mengenai fenomena yang diteliti

berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian.

Subjek penelitian terdiri atas aparatur pemerintah yang memiliki peran dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh di Kota Jambi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti jabatan, tugas, serta pengalaman yang berkaitan dengan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman. Informan yang terlibat dalam penelitian ini meliputi pejabat dan staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi yang memahami perencanaan maupun pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan strategi kebijakan, implementasi program, serta kendala yang dihadapi dalam penanganan kawasan kumuh. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lingkungan permukiman yang menjadi sasaran program peningkatan kualitas permukiman. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi seperti laporan kegiatan, dokumen perencanaan pembangunan, serta data terkait kondisi kawasan permukiman di Kota Jambi.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah diseleksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan antara temuan lapangan dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang sistematis mengenai strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dalam upaya penanganan kawasan permukiman kumuh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jambi dengan fokus pada strategi penanganan kawasan permukiman kumuh yang dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparatur pemerintah yang terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman, observasi lapangan pada beberapa kawasan sasaran program, serta telaah dokumen perencanaan dan laporan kegiatan instansi terkait. Pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu penelitian lapangan yang disesuaikan dengan jadwal kegiatan instansi dan ketersediaan informan. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam upaya mengurangi tingkat kekumuhan di kawasan permukiman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan kawasan kumuh di Kota Jambi berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman. Program yang dijalankan meliputi pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, rehabilitasi sistem drainase, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang permukiman. Upaya tersebut bertujuan memperbaiki kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat sekaligus mengurangi indikator kekumuhan yang terdapat pada kawasan permukiman. Implementasi program dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan infrastruktur serta prioritas kawasan yang membutuhkan penanganan lebih cepat.

Strategi Penanganan Kawasan Kumuh

Penetapan Tujuan Kebijakan

Penetapan tujuan menjadi langkah awal dalam perumusan strategi penanganan kawasan kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi. Tujuan utama kebijakan tersebut adalah meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan infrastruktur dasar yang memadai serta mengurangi luas kawasan yang dikategorikan kumuh. Penetapan tujuan tersebut juga sejalan dengan arah pembangunan daerah yang menekankan peningkatan kualitas permukiman dan lingkungan perkotaan yang layak huni.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur dinas terkait, penanganan kawasan kumuh dilakukan dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta rencana strategis organisasi perangkat daerah. Dokumen tersebut menjadi pedoman dalam menentukan prioritas program, alokasi sumber daya, serta indikator capaian yang ingin dicapai. Penetapan tujuan yang jelas menjadi dasar penting dalam mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan permukiman agar berjalan secara terstruktur dan terencana.

Implementasi Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman

Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan

Salah satu bentuk tindakan strategis yang dilakukan dalam penanganan kawasan kumuh adalah peningkatan kualitas jalan lingkungan. Jalan lingkungan memiliki fungsi penting sebagai sarana mobilitas masyarakat serta akses menuju berbagai fasilitas publik. Kondisi jalan yang rusak atau tidak memadai dapat menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan permukiman.

Program peningkatan jalan lingkungan dilakukan melalui pembangunan jalan baru maupun perbaikan jalan yang mengalami kerusakan. Dengan adanya perbaikan infrastruktur tersebut, aksesibilitas masyarakat menjadi lebih baik sehingga mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari. Selain itu, peningkatan kualitas jalan juga memberikan dampak positif terhadap penataan lingkungan permukiman secara keseluruhan.

Perbaikan dan Pembangunan Drainase Lingkungan

Drainase merupakan salah satu komponen penting dalam sistem infrastruktur permukiman yang berfungsi mengalirkan air hujan agar tidak menimbulkan genangan atau banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kawasan permukiman di Kota Jambi mengalami permasalahan drainase yang kurang berfungsi secara optimal, sehingga menyebabkan genangan air pada saat curah hujan tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah melalui dinas terkait melakukan pembangunan serta rehabilitasi saluran drainase lingkungan. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas aliran air sekaligus menjaga kualitas lingkungan permukiman. Perbaikan sistem drainase juga berperan dalam mengurangi risiko kerusakan lingkungan yang dapat memperburuk kondisi kawasan kumuh.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman

Selain pembangunan jalan dan drainase, strategi penanganan kawasan kumuh juga dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung permukiman. Fasilitas tersebut meliputi infrastruktur dasar yang mendukung kenyamanan dan kesehatan lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Penyediaan sarana permukiman menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan serta memperbaiki kondisi kawasan yang sebelumnya memiliki keterbatasan fasilitas dasar. Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata, aman, dan layak huni bagi masyarakat.

Evaluasi dan Tantangan Implementasi

Pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi. Salah satu kendala yang sering muncul

adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur permukiman. Keterbatasan tersebut menyebabkan pelaksanaan program harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas kawasan yang membutuhkan penanganan lebih mendesak. Selain faktor anggaran, koordinasi antarinstansi juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh. Penanganan permukiman pada dasarnya melibatkan berbagai sektor pembangunan sehingga memerlukan kerja sama yang baik antara instansi pemerintah maupun pihak terkait lainnya. Tanpa koordinasi yang efektif, pelaksanaan program berpotensi mengalami hambatan dalam proses perencanaan maupun implementasi di lapangan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Hasil tersebut sejalan dengan konsep strategi publik yang menekankan pentingnya keterpaduan antara penetapan tujuan, pelaksanaan tindakan, serta proses evaluasi kebijakan. Dengan demikian, penanganan kawasan kumuh tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga memerlukan perencanaan kebijakan yang terarah serta pengelolaan program yang berkelanjutan. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa strategi pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan pembangunan permukiman. Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan kondisi lingkungan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penguatan strategi kebijakan serta peningkatan koordinasi antarinstansi menjadi langkah penting untuk mendukung keberlanjutan program penanganan kawasan kumuh di Kota Jambi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dalam penanganan kawasan kumuh berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman sebagai langkah utama dalam memperbaiki kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat. Strategi tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, rehabilitasi sistem drainase, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung permukiman. Implementasi program tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan aksesibilitas lingkungan, pengurangan genangan air, serta perbaikan kualitas lingkungan permukiman secara umum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan kawasan kumuh sangat

dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, pelaksanaan program yang terarah, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola berbagai sumber daya pembangunan secara efektif.

Meskipun berbagai program peningkatan kualitas permukiman telah dilaksanakan, penelitian ini juga menemukan bahwa proses implementasi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran serta perlunya koordinasi yang lebih kuat antarinstansi dalam pelaksanaan program pembangunan permukiman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kawasan kumuh memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi serta dukungan kelembagaan yang lebih kuat agar program yang dijalankan dapat memberikan dampak yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, disarankan agar pemerintah daerah terus memperkuat perencanaan strategis dalam penanganan kawasan kumuh dengan meningkatkan koordinasi antarinstansi serta memperluas dukungan terhadap program peningkatan kualitas infrastruktur permukiman. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun juga menjadi aspek penting untuk memastikan keberlanjutan hasil pembangunan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada analisis strategi yang dijalankan oleh satu instansi pemerintah daerah, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya menggambarkan keseluruhan dinamika penanganan kawasan kumuh yang melibatkan berbagai aktor pembangunan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih luas mengenai kolaborasi antarinstansi pemerintah, peran masyarakat, serta pengaruh kebijakan pembangunan perkotaan terhadap keberhasilan program penanganan kawasan kumuh di tingkat daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Damayanti, F. U., Studi, P., Ips, T., Tarbiyah, F., & Ilmu, D. A. N. (2025). Kumuh di kelurahan hadimulyo barat kecamatan.
- Fitri, A. D., & Sulistinah, D. M. (2021). Faktor-faktor penyebab munculnya permukiman kumuh daerah perkotaan di Indonesia. *Jurnal Swara Bhumi*, 1(1).
- Hariri, J., & Hadi, M. (2020). Slum area and infrastructure development in Indonesia: A case study on Bandung city. *Journal of Indonesian Urban Studies*, 6(2), 55–72. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/451/1/013102>
- Istikasari, M., & Khadiyanto, P. (2014). Identifikasi permukiman kumuh di pusat kota Jambi. *Jurnal Ruang*, 2(4), 301–310.
- Jambi Kota. (2022). Kondisi demografi. *Jambi Kota*.

- Kettunen, P., Kallio, J., & Jari. (2019). Public sector strategies and innovation capacity: Institutional and managerial perspectives. *Public Management Review*, 21(2).
- Krisnajayanti, F., & Zain, I. M. (2016). Kajian permukiman kumuh di kawasan pesisir Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. *Swara Bhumi*, 4(2), 93–101.
- National Organizations. (2024). *University of the Southwest DBA 8513 - Strategic Planning: Sustainability & Competitive Advantage Course Syllabus*.
- Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2008). *Strategic management: Formulation, implementation, and control* (11th ed.). McGraw-Hill.
- Perkim Kota Jambi. (2023). *Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*. Satu Peta Satu Data Satu, Kota Jambi.
- Sari, A. R., & Ridlo, M. A. (2021). Studi literature: Identifikasi faktor penyebab terjadinya permukiman kumuh. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 160–176.
- Sukmaniar, A. J., Pitoyo, & Kurniawan, A. (2020). Vulnerability of economic resilience of slum settlements in the City of Palembang. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 451(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/451/1/012106>
- UN-Habitat. (2020). *World cities report: The value of sustainable urbanization*. United Nations Human Settlements Programme.
- Wheeler, S. (2013). *Planning for sustainability*.